

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang bentuk pemerintahannya republik. Dalam prakteknya negara Indonesia menganut asas demokrasi dan memiliki sistem pemerintahan presidensial. Secara umum demokrasi merupakan salah satu cara pendekatan terhadap masyarakat. Dasar untuk sebuah organisasi politik ialah wadah mengkader yang baik selama berproses belajar berorganisasi pada era sekarang. Tidak hanya itu, organisasi politik sering juga menjadi wadah dalam menyalurkan harapan untuk sebuah kemajuan negara untuk lebih baik lagi. Penyaluran harapan dimanfaatkan untuk memperoleh edukasi dan kaderisasi. Tidak serta hanya memperoleh kedudukan di sebuah negara.¹ Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 serta UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol yang menerangkan bahwa Parpol adalah sebuah golongan yang berkumpul, yang memiliki sikap semangat dalam berkebangsaan serta di didirikan beberapa kumpulan masyarakat indonesia yang berdiri atas dasar tidak ada keterpaksaan dan kemauan masyarakat dalam berjuang serta meneguhkan keperluan kelompok, orang lain, maupun negara. Selain itu, menjaga

¹ Areza, Tri Sandi Muji. 2020. *Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia*.

kedaulatan NKRI sesuai UUD NRI 1945. Dua-duanya merupakan tonggak demokrasi parpol.²

Keberadaan organisasi politik mempunyai eksistensi yang sangat fundamental. Pernyataan tersebut sudah tertuang di dalam kode etik organisasi politik. Kode etik tersebut dirumuskan oleh Pusat Penelitian Politik. Organisasi politik merupakan badan yang memiliki beberapa aturan yang sifatnya umum. Organisasi politik tersebut juga memiliki kegunaan lain, yaitu mengurus organisasi politik, merumuskan ketentuan, melakukan wawasan pada masing-masing perorangan, menjelaskan dan membangun keikutsertaan di tingkat daerah atau nasional. Apabila dalam pelaksanaan organisasi politik diterapkan dengan baik akan menjadi pendukung pelaksanaan demokrasi yang lebih baik.³

Kaderisasi sangat erat berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi politik dan mempersiapkan calon pemimpin berahlak, dapat dipercaya oleh masyarakat, menjalankan dengan baik amanat rakyat dan undang-undang, serta dapat bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. Akan tetapi, hal itu belum dilakukan sepenuhnya. Sejauh ini perkaderan yang diterapkan menggunakan cara konservatif. Parpol yang berkembang dan yang mempunyai ciri catch-all party yang belum mempunyai latar

² UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 29 ayat 1

³ Saptalia, Pipit Adhe. 2020. *Mekanisme Rekrutmen Dalam Meningkatkan Kualitas Caleg Partai Golkar Di Kota Tegal* hal. 20

belakang yang sama, keturunan yang sama dan masih bergantung pada calon individu itu sendiri.

Sebagian partai politik belum mempunyai proses perekrutan yang nyata, akibatnya awal mula proses perkaderan lebih mengutamakan oligarki. Proses perkaderan ini masih menentukan kader berdasarkan saling percaya, berasal dari daerah yang sama, memiliki kesamaan dalam berpartai politik, serta hubungan antara calon anggota dan pemimpin. Gambarannya para elit politik melampaui batas, para kader merupakan seorang artis di Indonesia, ataupun seorang yang viral di media sosial karena kebaikan dan kehebatannya, orang kaya, serta pengusaha atau CEO yang kadang meragukan akan potensi berpolitik. Hal itu membuat salah satu permasalahan yang berkaitan dalam proses perkaderan serta kandidat berpolitik yang diselenggarakan parpol. Rekrutmen berkaitan tentang bagaimana organisasi parpol yang menyediakan calon sumber daya manusia yang siap mengemban tugas dari rakyat kepada partai yang mengusungnya. Hal itu menjadikan asal muasal dalam proses berpolitik untuk memenuhi posisi yang ada di dalam pemerintahan ataupun menjadi pemimpin sebuah parpol.

Menurut Noviza Rizki (2019) menyatakan bahwa model rekrutmen yang dilaksanakan ialah rekrutmen secara rahasia, dimana Partai Aceh terletak di tempat yang tepat untuk memantau dalam memilih anggota. Model rekrutmen calon legislatif Partai Aceh ialah memantau kemampuan

setiap personal melalui sumber yang bertahap, yaitu melalui sumber KPA, simpatisan, sampai sipil biasa sesuai urutan. Faktor pendorong dan penghambat rekrutmen calon legislatif Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya ialah urgensitasnya hubungan kerja sama antar kader Partai Aceh dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Faktor penghambat Rekrutmen ialah sumber daya manusia yang tidak mencapai ketentuan sebagai calon legislatif Partai Aceh dalam pemilu di Kabupaten Aceh Jaya.

Menurut Sevtia Amalia Silvi (2024) di Lampung proses pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilu 2024 dilakukan secara rahasia meskipun PKS memberi peluang pada rakyat umum bagi yang belum bergabung dalam anggota PKS. Para calon yang telah lolos wajib melakukan pendaftaran ulang sebagai anggota PKS. Kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota legislatif ialah mempunyai Kartu Tanda Anggota sebagai bukti telah ikut serta dalam keanggotaan partai. Jadi, calon anggota legislatif pada Daerah Pimpinan Wilayah PKS Lampung berasal dari dalam PKS.

Menurut Steven Wisnu Prayoga Pamungkas (2023) proses rekrutmen pada partai didominasi lebih tertutup. Dalam hal ini, penentuan perorangan dalam posisi yang kosong tidak sesuai dengan kemampuan masing-masing, tetapi melalui pendekatan elit partai dan donatur. Alhasil, anggota-anggota yang memiliki keahlian tetapi kekurangan biaya, tidak dapat melanjutkan kenaikan jabatan dengan baik. Proses rekrutmen yang

dilaksanakan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada penetapan calon anggota legislatif Kabupaten Lampung Selatan sebagai perwakilan di daerah pemilihan individu-individu memakai sistem rahasia. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya keikutsertaan Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan provinsi Lampung supaya nama kandidat yang dicalonkan dapat terpilih dalam pemilu legislatif 2024. Faktor Pendukung proses rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan ialah keterlibatan dari Pengurus Partai PDI Perjuangan di setiap dapil agar mendapatkan suara yang lebih baik, hal itu ditunjukkan dalam tingginya suara yang masuk dalam partai demokrasi Indonesia perjuangan. Faktor penghambat proses rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan yaitu memiliki masalah pada penomoran nomor urut pada posisi-posisi yang tidak menurut kemampuannya, tetapi melalui pendekatan pada elit partai dan donatur.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu yang tercantum, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pada pembahasan ini memiliki kesamaan dengan variabel ketiga penelitian tersebut, yakni utamanya mengenai Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Oleh Partai Politik. Maka penelitian ini akan membahas lebih dalam namun menggunakan perspektif yang berbeda yaitu ditinjau dari aspek demokrasi di DPD Partai

Golongan Karya Kabupaten Malang. Selain itu, penelitian ini juga cenderung terfokus pada Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD tindak lanjut atau langkah yang diambil oleh DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Malang dalam melakukan pencalonan anggota partai politik di demokrasi internal Partai Politik Golongan Karya Kabupaten Malang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai proses rekrutmen calon anggota dprd oleh partai politik sehingga rekrutmen partai-partai politik yang dijalankan dengan benar dapat menjadi faktor pendorong bagi praktik demokrasi yang lebih baik. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian “ Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Oleh Partai Politik Ditinjau Dari Aspek Demokrasi (Studi Di Dpd Partai Golongan Karya Kabupaten Malang).”

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses rekrutmen calon anggota DPRD oleh partai politik ditinjau dari aspek demokrasi di DPD Partai Golongan Karya kabupaten malang?
2. Apa yang menjadi Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Proses rekrutmen calon anggota DPRD oleh partai politik ditinjau dari aspek demokrasi di DPD Partai Golongan Karya kabupaten malang ?

3. Bagaimana solusi yang diberikan oleh DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Malang dalam mengatasi Faktor Penghambat dalam Proses rekrutmen calon anggota DPRD oleh partai politik ditinjau dari aspek demokrasi?

C. Tujuan Penelitian

Menurut uraian rumusan masalah tersebut. Dapat dirumuskan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Proses rekrutmen calon anggota DPRD oleh partai politik ditinjau dari aspek demokrasi di DPD Partai Golongan Karya kabupaten malang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Proses rekrutmen calon anggota DPRD oleh partai politik ditinjau dari aspek demokrasi di DPD Partai Golongan Karya kabupaten malang.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji solusi yang ditawarkan DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Malang dalam mengatasi Faktor Penghambat dalam Proses rekrutmen calon anggota DPRD oleh partai politik ditinjau dari aspek demokrasi pada pemilu legislatif di Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi Pemerintah, Peneliti dan Partai Politik, sehingga peneliti mengharapkan manfaat sebagai berikut:

1. Pemerintah

- a. Hasil penelitian ini berharap dijadikan sumber rujukan referensi untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan hasil penelitian ini dilain waktu.
- b. Hasil penelitian ini berharap dijadikan referensi ilmu bagi pemerintah untuk menyempurnakan peraturan partai politik maupun yang dibutuhkan oleh orang lain.

2. Bagi Subjek Peneliti

- a. Bagi Peneliti yaitu memperbanyak wawasan pengetahuan dan menjadi bahan untuk mengembangkan Proses rekrutmen calon anggota DPRD oleh partai politik ditinjau dari aspek demokrasi di DPD Partai Golongan Karya kabupaten malang.

3. Partai Politik

- a. Bagi Partai politik yaitu diharapkan menjadi bahan masukan DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Malang sesuai dengan fungsi dan peran lembaga tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat baik bagi obyek peneliti, sehingga peneliti mengharapakan kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis bagi partai politik yang terkait dengan penelitian ini, dapat mengembangkan sistem rekrutmen anggota partai politik pada

pemilu legislative dengan menggunakan juklak teknis dan berpedoman AD/ART partai politik sehingga dapat memberikan hasil anggota partai yang baik dan memiliki kapasitas yang diperlukan didalam legislatif.

2. Kegunaan Akademis bagi partai politik di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan Proses rekrutmen calon anggota DPRD oleh partai politik ditinjau dari aspek demokrasi di DPD Partai Golongan Karya kabupaten malang.

F. Metode Penelitian

Penggunaan metode penelitian dalam pra, proses maupun hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian ini terdiri :

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian dalam skripsi ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis sosiologis, penelitian yang menggunakan fakta di lapangan, mengenai Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Oleh Partai Politik Ditinjau Dari Aspek Demokrasi Di DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Malang.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian ini di Kabupaten Malang, tepatnya di Kantor DPD Partai Golongan Karya kabupaten Malang yang beralamat di Jl. Raya Karangpandan, Kec. Pakisaji, Malang. Peneliti menentukan pemilihan tempat tersebut, karena menyamakan antara judul dan wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti. Tidak hanya itu, di DPD Partai Golongan Karya kabupaten Malang juga sudah menyediakan sarana serta prasarana yang akan diteliti. Terbilang dengan lingkup yang kecil, peneliti dapat lebih simple untuk menyelesaikan penelitian yang akan dilakukan.

3. Jenis dan Sumber Data

Menurut Albi Anggit dan Johan Setiawan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai *instrument kunci*.⁴

Data yang disajikan meliputi sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵

a. Data Primer

Bahan mentah diambil langsung oleh peneliti di lokasi penelitian. Peneliti melakukan penelitian ini menggunakan teknik observasi

⁴ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, S. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi. Penerbit CV Jejak. Hal 8.

⁵ Pedoman tugas akhir program sarjana strata 1 FH UMM

langsung untuk mengkaji Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Oleh Partai Politik Ditinjau Dari Aspek Demokrasi Di DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Malang. Demikian, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, yakni, wawancara dengan informan atau penolong untuk memperoleh beberapa informasi tersebut, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitiannya. Pihak yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini yakni pihak Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya kabupaten malang Bapak Siadi, SH, Wakil Ketua bidang Organisasi Bapak Sudarman, S.Pd, Wakil Ketua bidang kaderisasi dan keanggotaan Bapak Wiwit Priyohandoko dan anggota DPD Partai Golongan Karya kabupaten malang yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang didapat dengan cara tidak langsung, melengkapi data primer : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Penelitian Terdahulu dan Buku, data yang peroleh tidak langsung, seperti profil partai, visi misi partai, data keanggotaan partai, serta program kerja partai, dan tentang masalah penelitian terkait.

4. Metode Pengumpulan Data

Merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis maka peneliti memilih untuk menggunakan wawancara, kepustakaan untuk mempelajari peraturan peraturan, buku - buku, undang-undang yang berkaitan, serta jurnal.

- a. Wawancara, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara bertatap muka atau *face to face* dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Malang, Wakil Ketua bidang Organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Malang, Wakil Ketua bidang Kaderisasi dan Keanggotaan bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan untuk pengumpulan informasi.
- b. Studi kepustakaan, dimana peneliti membutuhkan tambahan pengumpulan informasi melalui data atau dokumen baik tertulis atau gambar foto sebagai tambahan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan.
- c. Observasi

Observasi adalah cara penghimpunan bahan penelitian guna mengamati pola laku manusia, tahap kerja dan fenomena sekitar,

serta informan. Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti akan melakukan observasi atau observasi langsung di Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Malang.

d. Elektronik studi

Dilakukan peneliti dengan memperoleh data-data penelitian terdahulu dan referensi jurnal penelitian melalui studi internet.

e. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. "Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah kehidupan, perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik , atau karya-karya monumental seseorang.

G. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh antara lain, baik data itu deskriptif kualitatif, dianalisis dan disajikan secara analisis, untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah nantinya. Analisis dapat bervariasi mulai dari yang sangat terstruktur dengan catatan rinci mengenai tingkah laku sampai dengan deksripsi yang paling kabur tentang kejadian dan tingkah laku. Sedangkan wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan. Dalam hal melakukan wawancara mendalam, pertanyaan yang kaku haruslah dihindari, sebaliknya disarankan membuat pertanyaan yang bersifat umum berdasarkan substansi *setting*. Analisis data yang digunakan, analisis yang berupaya memberikan gambaran yang jelas dan konkret mengenai masalah pada penelitian ini baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya data akan disajikan secara deskriptif dengan menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang erat kaitannya pada penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, adapun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat deskripsi atau uraian tentang bahan- bahan :

Daftar Isi, Bab I, Pendahuluan, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Bab II, Kajian Pustaka, Pola Rekrutmen, Mekanisme Pola Rekrutmen, Rekrutmen Partai Politik, Calon Anggota Legislatif, Fungsi Anggota Legislatif, Pengertian Partai Politik, Fungsi Partai Politik, Tujuan Partai Politik, Pemilihan Umum, Tujuan Pemilu, Sistem Pemilihan Umum.

Teori, doktrin, atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.dalam penelitian ini didukung dengan beberapa teori yaitu teori tinjauan mengenai kebijakan yang mana dijabarkan mengenai Pendahuluan, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Kajian Pustaka, Pola Rekrutmen, Mekanisme Pola Rekrutmen, Rekrutmen Partai Politik, Calon Anggota

Legislatif, Fungsi Anggota Legislatif, Pengertian Partai Politik, Fungsi Partai Politik, Tujuan Partai Politik, Pemilihan Umum, Tujuan Pemilu, Sistem Pemilihan Umum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dari hasil Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Oleh Partai Politik Ditinjau Dari Aspek Demokrasi Di DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Malang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian yang diteliti.

